

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Studi Kasus berasal dari bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (1989), kata “kasus” diambil dari kata “*Case*” dimaksudkan sebagai:

- 1) “*instance or example of the occurrence*”, artinya contoh kejadian sesuatu,
- 2) “*actual state of affair; situation*”, artinya kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan
- 3) “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”, artinya lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Jadi, studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas; baik pada tingkat perseorangan, sekelompok orang, dan lembaga maupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, kasus yang dipilih peneliti adalah organisasi nonprofit bernama LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba, karena di dalam kedua LKS tersebut memiliki peristiwa yang aktual (*real-life events*) dan sedang berlangsung, seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan. Dengan begitu, LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba mempunyai keunikan tersendiri.

Alasan peneliti memilih kedua LKS tersebut sebagai kasus sebab keduanya berkasus sama/tunggal. Dalam kaitan ini, Stake (1995) membuat rambu-rambu tentang hal tersebut pada kedua LKS dan dipakai peneliti sebagai

pertimbangan terhadap kasus yang diteliti: 1) hakikat atau sifat kasus itu sendiri, 2) latar belakang terjadinya kasus, 3) *setting* fisik kasus tersebut, 4) konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum, dan seni, 5) kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut, dan 6) informan yang menguasai kasus yang diteliti.

Secara lebih teknis, Smith (1978) menjelaskan bahwa kasus yang dimaksudkan sebagai a "*bounded system*" merupakan sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sebab, hakikatnya sulit memahami sebuah kasus tanpa memperhatikan kasus lain. Ada bagian-bagian lain yang bekerja untuk sistem tersebut secara integratif dan terpol. Karena tidak berdiri sendiri, sebuah kasus hanya dapat dipahami ketika peneliti juga memahami kasus lain. Peneliti memilih kedua LKS sebagai kasus dengan alasan prioritas bahwa kedua LKS berkasus sama, yaitu unsur sengaja sehingga Endraswara (2012) menyebutnya sebagai *collective case study*, walau kasus yang diteliti lebih dari satu dengan prosedurnya sama seperti studi kasus tunggal.

Ketika pengekplorasian dilakukan secara mendalam peneliti harus mengalinya dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa (Yin, 2015).

1) Kata "apa" (*what*) dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*), 2) "bagaimana" (*how*) untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif (*explanative knowledge*), dan 3) "mengapa" (*why*) untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*). Hal ini ditegaskan Yin (2015) bahwa kata "bagaimana" dan "mengapa" digunakan karena kedua kata tanya tersebut untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang

dikaji. Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang dipakai untuk memperoleh data. Pertanyaan “bagaimana” untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa, sedangkan pertanyaan “mengapa” (*why*) untuk mencari alasan (*reasons*) mengapa peristiwa tertentu dapat terjadi. Perolehan alasan (*reasons*) tentang mengapa sebuah tindakan dilakukan oleh subjek tersebut haruslah digali peneliti dari dalam diri subjek. Karena, perlu juga diketahui bahwa peneliti studi kasus ini ingin memahami tindakan subjek dari sisi subjek penelitian, bukan dari sisi peneliti. Dengan begitu, diharapkan dapat diperoleh manfaat besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebab sebuah peristiwa (kasus) akan terangkat ke permukaan hingga akhirnya menjadi pengetahuan publik, dan peneliti menyakini secara akademik bahwa LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba termasuk kasus berbobot yang berfokus pada peristiwa kontemporer, dan berupa penyimpangan dari kewajaran.

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, menurut Endraswara (2012) Studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan: Pertama, Studi kasus ini bersifat kuratif, yaitu *retrospective case study*, yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*). Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang berkompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian. Kedua, Studi kasus ke arah perkembangan yang positif, yaitu *prospective case study*. Jenis studi kasus ini diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Tindak lanjutnya berupa penelitian tindakan (*action research*) yang dilakukan juga oleh pihak lain yang berkompeten, dan tidak menutup

kemungkinan apabila peneliti berkompenten dan mampu juga menjadi aktor dalam *treatment*. Dalam penelitian ini peneliti berperan sampai pada memberikan sebagian tindak lanjut penyembuhan dan memberikan masukan kepada pengurus dan pengelola. Langkah-langkah studi kasus menurut Creswell (2016), meliputi:

1. Pemilihan tema

Peneliti harus memiliki topik dan kasus pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Kasus dapat diperoleh dari hasil pengamatan peneliti sendiri, pengalamannya selama ini, hasil membaca buku, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi dengan teman sejawat, dan membaca hasil penelitian orang lain. Selanjutnya, menentukan tema besar penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan tema besar “*governance* LKS”, dari tema besar disempitkan menjadi tiga topik, yaitu tipologi *governance*, mekanisme *governance*, dan kepatuhan LKS terhadap peraturan negara. Selanjutnya peneliti menentukan unit analisis dan judul. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tema ---- Topik ---- Obyek kajian (unit analisis) ---- Judul dan literatur/bahan

2. Pembacaan Literatur

Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan bacaan sebanyak-banyaknya berupa paper, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Menurut Yin (2015) pembacaan literatur sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di bidang yang akan diteliti dan mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan. Secara singkat Yin (2015) menyatakan, bahwa upaya pengumpulan bahan bacaan peneliti

perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yakni relevansi (*relevance*) bahan bacaan/literatur tersebut dengan topik bahasan (kasus) yang diangkat dan kebaruan (*novelty*). Kualitas penelitian tidak ditentukan oleh tebalnya atau banyaknya halaman hasil/laporan penelitian, tetapi oleh ketepatan metode penelitian, keluasan perspektif teoritik peneliti, keandalan dan kecukupan data, kedalaman analisis, dan temuan baru serta sumbangannya bagi ilmu pengetahuan.

3. Perumusan Fokus dan Masalah

Perihal merumuskan fokus dan masalah penelitian merupakan langkah sangat penting dalam setiap penelitian. Dalam kaitan ini, fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti dapat berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Melalui rumusan masalah penelitian dapat digali mengenai informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, dan bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan (*participant observation*), dan dokumentasi. Berhubungan dengan hal ini, peneliti merupakan instrumen kunci karena dirinya dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Selain itu, peneliti menentukan pula informan yang tepat untuk diwawancarai, bilamana serta di mana wawancara dilakukan, dan melakukan penyempurnaan data-data.

5. Penyempurnaan Data

Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Penyempurnaan data

dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah datanya kurang atau belum sempurna dengan cara membaca keseluruhan data dan merujuknya pada rumusan masalah yang diajukan. Apabila rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sudah sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan bertemu dengan informan untuk melengkapi datanya. Itulah sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.

6. Pengolahan Data

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, dengan cara mengadakan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyanjian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah tahap analisis.

7. Analisis data

Analisis data dilakukan peneliti setelah data berupa transkrip hasil wawancara serta observasi, gambar, foto, catatan harian subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif umumnya hanya dapat dilakukan oleh peneliti, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Dengan begitu, peneliti sebagai instrumen kunci yang hanya mengetahui secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus juga paling sulit. Sebab, melalui tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian.

Sebaliknya, kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoritik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Dengan demikian, mengacu pada teknik analisis data kualitatif Creswell (2016), teknik analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga langkah, yaitu:

- 1) Mereduksi data, artinya melakukan kegiatan merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal yang penting, dicari tema serta polanya, dan membuang hal yang tidak diperlukan. Setiap peneliti dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.
- 2) Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melakukan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan atas hal apa yang dipahami tersebut.
- 3) Kesimpulan atau *conclusion (drawing/verification)* dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

8. Proses Analisis Data

Proses analisis data pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan

menganalisis data untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pada pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data yang baku dalam penelitian kualitatif, tetapi peneliti melakukan langkah-langkah berikut: Pertama, peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi secara umum (*general*) dari masing-masing transkrip. Kedua, pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya (*specific messages*), dari pesan-pesan khusus ini akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, ketiga, data dikelompokkan berdasarkan atas urutan kejadian, kategori, dan tipologinya; aktivitas ini dimulai sejak peneliti di lapangan ketika mengumpulkan data dan saat data sudah terkumpul semua.

9. Dialog Teoritik

Kegunaan dialog teoritik untuk melahirkan temuan konseptual berupa “*thesis statement*” setelah pertanyaan penelitian terjawab. Peneliti melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka sehingga bagian kajian pustaka bukan sekadar ornamen belaka, tetapi kajian teoritik akan mendasari temuan yang baru (*new findings*), walaupun tidak harus berupa teori.

10. Triangulasi Temuan

Triangulasi temuan atau konfirmasi, dimaksudkan agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmasi, yakni melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Seorang peneliti harus jujur sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Oleh karena itu, seorang peneliti yang akan menjadi ilmuwan haruslah memiliki kejujuran, bertindak secara objektif, bertanggung jawab, dan profesional.

11. Simpulan Hasil Penelitian

Simpulan Hasil Penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian simpulan hasil penelitian ialah peneliti mengulang atau meringkas hal apa saja yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya tersebut.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi teoritik, padahal simpulan hasil penelitian untuk mengembangkan teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian (*theoretical development*). Selain itu, juga dikemukakan temuan baru (*new findings*), baik berupa konsep dan formula serta model maupun teori. Proses penelitian hingga sampai pada teori, seperti berikut ini:

Data ---- *Fact* ---- *Concept* ---- *Proposition* ---- *Theory*

12. Laporan Penelitian

Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan

penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Penulisan laporan studi kasus menurut Yin (1989) ada 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu objektif, sistematis, dan mengikuti metode ilmiah.

Karena sifat dasar bahan yang dikaji serta tujuan yang ingin dicapai, dapat saja langkah-langkah tersebut diubah menurut dinamika lapangan ataupun rumpun kajian. Misalnya, penajaman dan perumusan ulang setelah peneliti melakukan penjajakan lapangan. Tentu saja, penajaman ulang ini perlu dilakukan berdasarkan atas ketersediaan data, serta dimaksudkan untuk meningkatkan kebermaknaan kajian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Creswell (2016) menjelaskan bahwa metode kualitatif memiliki pendekatan yang beragam dengan mengandalkan teks, gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi penelitian serta dari penelitian yang berbeda-beda. Rancangan utama kualitatif terkait dengan pengumpulan data serta analisis data dan laporan penelitian, namun tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang proses penelitian, seperti jenis problem, masalah etis, dan sebagainya.

Selanjutnya, Creswell (2016) mengungkapkan, bahwa karakteristik pokok yang mendefinisikan penelitian kualitatif meliputi: 1) Lingkungan alamiah, yaitu parapeneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi tempat parapartisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. 2) Peneliti sebagai

instrumen kunci, artinya peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data-data yang diperlukannya, seperti dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan partisipan. 3) Beragam sumber data, artinya peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. 4) Analisis data induktif dan deduktif, yaitu parapeneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas (induktif), mengolah data ke dalam unit-unit yang lebih abstrak. Kemudian secara deduktif peneliti melihat kembali data parapartisipan dari tema-tema untuk menentukan apakah lebih banyak bukti dapat mendukung setiap tema dan apakah parapartisipan perlu menggabungkan informasi. 5) Makna dari parapartisipan, maksudnya peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan parapartisipan terhadap isu atau masalah yang disampaikan, bukan dari peneliti lain atau bahkan literatur-literatur tertentu. 6). Rancangan yang berkembang, dalam kualitatif proses penelitian selalu berkembang. Rencana awal penelitian tidak dapat secara ketat dipatuhi, seperti pertanyaan-pertanyaan dapat berubah, strategi pengumpulan data, dan lain-lain. 7) Refleksibilitas, peneliti merefleksikan cara bagaimana peran parapartisipan dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya berpotensi membentuk interpretasi, seperti tema-tema yang dikembangkan dan makna-makna yang dianggap sebagai sumber data. 8) Pandangan menyeluruh, peneliti berusaha untuk membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Hal tersebut melibatkan usaha pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi

tertentu, dan secara umum berusaha membuat sketsa atas gambaran besar yang muncul.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sengaja dipilih yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti dan juga merupakan gagasan di balik penelitian kualitatif (Creswell, 2016). Penelitian ini dilakukan di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba. Kedua LKS ini bergerak pada pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

LKS Mardi Wuto merupakan sebuah LKS yang memiliki keunikan karena fokus kegiatannya pada disabilitas netra. LKS ini beralamat di Jalan C. Simanjuntak, No. A-5 Yogyakarta. Keunikan tersebut berbeda dengan LKS Hamba, yang memiliki keunikan terhadap pelayanan kepada anak yang tertolak oleh keluarga dan lingkungannya. LKS Hamba beralamat di Dusun Katen RT 02/ RW 013, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Propinsi DIY.

2.3. Sejarah LKS

Sejarah merupakan suatu fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan kemudian digunakan untuk merekonstruksi kejadian pada masa tersebut. Fakta itu menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberikan tafsiran, dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan

dimengerti. Persitiwa dalam sejarah haruslah benar-benar terjadi pada masa lalu yang dapat diperoleh dari berbagai sumber sejarah.

Peristiwa yang terjadi pada dasarnya menjadi sumber perhatian manusia pada umumnya, tetapi hanya dapat diingat secara poin-poinnya. Demikian pula halnya dengan peristiwa yang terjadi pada organisasi, khususnya LKS. Dalam kaitan ini, sejarah LKS akan menjadi dasar pengembangan oleh parapengelola pada saat diberikan mandat.

2.3.1. Sejarah LKS Mardi Wuto

Badan Sosial Mardi Wuto didirikan oleh “dr. Yap Hong Tjoen, direktur Rumah Sakit Mata “dr. Yap” pada 12 September 1926, dengan nama *Sticting Vorstenlandsch Blinden Instituut* (VBI), bertujuan memperbaiki nasib tunanetra tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama dan tingkat ekonomi, seperti tercantum pada pasal 3B anggaran dasar memberdayakan serta meningkatkan kemandirian tunanetra.

Dalam perkembangannya VBI pada 17 Juni 1949 disebut sebagai “Balai Mardi Wuto”. Selanjutnya pada 20 Agustus 1991 Yayasan Mardi Wuto didirikan dengan Akte Notaris Nomor 14 Tahun 1991 dan terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi DIY. Surat Tanda Pendaftaran Nomor 05/PKY/Kwl/V-92 ini diterbitkan untuk menggantikan fungsi dan melanjutkan usaha-usaha *Sticting Vorstenlandsch Blinden Instituut* (VBI). Perkembangan VBI selanjutnya dikenal dengan “Balai Mardi Wuto”. Berdasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan dr. Yap Prawirohusodo Nomor 17

pada 12 September 2008, Badan Sosial Mardi Wuto menjadi salah satu unit kerja dari Yayasan dr. Yap Prawirohusodo.

Adapun Visi Badan Sosial Mardi Wuto adalah “menjadi lembaga sosial terkemuka di Indonesia yang mampu memberdayakan paratunanetra menuju terwujudnya tunanetra mandiri di tahun 2020”.

Misi Badan Sosial Mardi Wuto: a) membina dan membantu tunanetra dalam mengembangkan diri menuju terwujudnya kemandirian. b) meningkatkan kualitas layanan dan prasarana, khususnya tanpa membedakan suku, agama, latar belakang sosial ekonomi, dan pendidikan. c) menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang berkualitas dan profesional, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kinerja Badan Sosial Mardi Wuto dalam memberikan layanan kepada tunanetra. LKS Mardi Wuto bertujuan membantu pemerintah di bidang sosial dan kemanusiaan dengan sasaran disabilitas netra.

2.3.2. Sejarah LKS Hamba

LKS Hamba dirintis dan didirikan oleh dua orang, yaitu Lestari (eks. biarawati) dan Eddy (pengusaha) yang mulai beraktivitas di Jakarta pada 1976 dengan klien keluarga-keluarga tidak memiliki rumah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Mulai 1980 layanan berkembang pada pendampingan bagi anak-anak jalanan di Jakarta. Pada 1984 aktivitas pelayanan diformalkan dengan membentuk Yayasan Amalia sebagai organisasi sosial formal yang menaungi aktivitas layanan di atas. Dengan alasan manajemen, pada 1995 Yayasan Amalia berubah nama menjadi Yayasan Aulia dan mulai membuka cabang di Yogyakarta.

Pada 1995 sampai dengan 15 Oktober 2012 Yayasan Aulia di Yogyakarta menjadi satu manajemen dengan Yayasan Aulia Jakarta. Dengan begitu, mulai 15 Oktober 2012 Yayasan Aulia di Yogyakarta menetapkan diri untuk mandiri dan lepas dari Yayasan Aulia Jakarta dengan membuat nama baru, yaitu Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cita, disingkat Yayasan Hamba Yogyakarta.

Yayasan Hamba sebagai organisasi nonpemerintah bersifat independen dengan fokus layanan kepada anak-anak yang ditolak dan merasa ditolak oleh keluarga dan lingkungannya, menyediakan rumah perlindungan anak (rumah tinggal bagi anak-anak), dan memberikan layanan anak-anak di luar panti.

Visi Yayasan Hamba: “Cita-cita kami untuk semua anak”. Terciptanya suasana saling mencintai antarsesama manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan cinta, harkat, dan martabat yang sama (AD-RT LKS Hamba). Melalui visi ini diharapkan setiap anak hidup dan tumbuh dalam keluarga bersuasana saling mencintai, setiap anak hidup dan tumbuh dalam cinta kasih yang penuh, dan setiap anak hidup serta tumbuh dalam penghargaan terhadap harkat dan martabatnya.

Misi Yayasan Hamba: “yang kami lakukan adalah”: melayani anak yang ditolak serta merasa ditolak oleh keluarga dan atau masyarakat lingkungannya, dan atau dalam kesendirian dengan memupuk rasa solidaritas terhadapnya, serta membimbingnya ke arah kemandirian dalam rangka pembangunan masyarakat. Sesuai dengan visinya, Yayasan Hamba bertujuan: a) Melayani orang yang ditolak atau orang yang merasa tertolak dan dalam kesendirian oleh keluarga dan masyarakat lingkungannya. b) Memupuk rasa solidaritas di kalangan masyarakat

terhadapnya, seperti tersebut dalam sub (a) di atas. c) Membimbing orang-orang yang tersebut di atas, ke arah kemandirian dalam rangka pembangunan masyarakat.

2.4. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

2.4.1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi (Sekaran dan Bougie, 2017). Penelitian ini telah melakukan wawancara kepada Pengurus dan Pengelola. Pengurus LKS Mardi Wuto terdiri dari pembina, pengawas dan ketua yayasan; sedangkan wawancara Pengelola LKS Mardi Wuto dilakukan dengan ketua LKS (pengelola), ketua bidang pelayanan, dan kepala tatausaha beserta staf.

Di LKS Hamba peneliti telah melakukan wawancara kepada pendiri, Pengurus dan Pengelola. Pengurus LKS Hamba melakukan wawancara kepada pembina, pengawas dan ketua Yayasan. Pengelola LKS Hamba melakukan wawancara kepada ketua LKS (pengelola), sekretaris dan bendahara. Pada saat penelitian berlangsung di LKS Hamba sedang terjadi pergantian pengurus sehingga ada pengurus yang *rolling* posisi dan ada pendatang baru yang berasal dari relawan.

Unsur Pengurus dan Pengelola dari kedua LKS sebagai triangulasi sumber. Data yang diperoleh berupa biodata narasumber, transkrip wawancara, dan data primer yang telah diolah sebagai pendukung penelitian ini. Di LKS Mardi Wuto wawancara dilakukan kepada ketua yayasan (pengurus) dan Ketua LKS (pengelola) sebagai narasumber yang dianggap paling mengerti mengenai penerapan konsep *good corporate governance*. Selain itu, juga dilakukan wawancara kepada pembina dan pengawas serta satu bidang pelayanan, kepala tatausaha dan satu Staf LKS Mardi Wuto sebagai triangulasi.

Di LKS Hamba wawancara dilakukan kepada pendiri sekaligus pembina, pengawas, Ketua LKS Hamba. Ketua Yayasan Hamba, pengawas dan Ketua LKS Hamba sebagai narasumber yang dianggap paling mengerti tentang penerapan konsep *good corporate governance*, selain itu wawancara juga dilakukan kepada sekertaris LKS, dan bendahara sebagai triangulasi.

Khusus di LKS Hamba, *interview* untuk pengawas dilakukan kepada dua orang dan keduanya menjabat sebagai ketua pengawas, padahal dalam satu unit yang sama karena estafet kepengurusan. Dengan begitu, secara kesengajaan di LKS Hamba, ketua yayasan, sekretaris yayasan dan bendahara yayasan merangkap jabatan menjadi ketua LKS, sekretaris LKS dan bendahara LKS.

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sekaran dan Bougie (2017) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang peneliti kumpulkan dan dianalisis ini, disajikan pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Data Sekunder LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba

No.	LKS Mardi Wuto	LKS Hamba
1.	Profil Yayasan dr. Yap Prawirohusodo dan profil LKS Mardi Wuto	Profil Yayasan Hamba dan Profil LKS Hamba
2.	Laporan tahunan Notulensi rapat	Laporan hasil rapat mingguan, bulanan, dan tahunan
3.	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART)	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART)
4.	Borang Lomba LKS	Borang Lomba LKS
5.	Borang persiapan akreditasi LKS	Borang akreditasi LKS
6.	Borang pendataan LKS (sensus LKS)	Borang pendataan LKS (sensus LKS)
7.		Laporan <i>case conference</i>
8.	Foto-foto dan dokumen kegiatan lainnya Laporan hasil penelitian yang dilakukan di LKS Mardi Wuto	Foto-foto dan dokumen kegiatan lainnya Laporan hasil penelitian yang dilakukan di LKS Hamba
		Draf buku: 42 tahun bersama malaikat yang menyembunyikan sayapnya.

Sumber: Data primer 2018.

Data sekunder lainnya diperoleh dari luar kedua LKS, yaitu dokumen perizinan LKS yang berada di BK3S, data hasil pendataan LKS di Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial di Daerah DIY, buku sebagai referensi dan paper atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian organisasi nirlaba dan *corporate governance*, Draf Perda LKS Daerah DIY, Laporan Hasil Sosialisasi SPNA. Laporan Diklat TKS, Laporan Diklat Tatakelola LKS, dan Laporan Diklat TKS Mandiri.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, meliputi:

2.5.1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dalam kualitatif ialah wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dapat diajukan peneliti berupa

pertanyaan kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid. Informan terdiri dari Pengurus atau organyayasan dan pengelola. Wawancara merupakan upaya memperoleh data-data pokok dan data pendukung. Ketika telah dilakukan wawancara terdapat data yang terlewatkan atau belum valid sehingga sebagian dapat dilakukan wawancara lebih dari satu kali, seperti wawancara dengan informan LKS Mardi Wuto: GBPH.H. Prabukusumo, S.Psi.; Sri Budiastuti Soenandar, S.H.; Dra. IM Narsih, Apt., S.U.; dan juga dengan informan LKS Hamba: Dra. Lestari Projosuto, M.A.; Konaah Anisa Sri Melani; serta Nusya Kuswardani, S.H., M.A.

Ketika wawancara sudah dilakukan lebih dari satu kali, tetapi masih juga ada data yang kurang, peneliti dapat melengkapi data melalui telepon dan *WhatsApp*, serta melalui wawancara kelompok semi FGD; dan ditegaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap eksploratif (Creswell, 2016; dan Bougie, 2017).

Pada awal melakukan penelitian, peneliti mengalami beberapa perubahan seperti saat ujian proposal peneliti mengajukan lima LKS. Akan tetapi, tim penguji mengusulkan dua LKS, dan dua LKS ini yang dipilih awalnya adalah LKS Mardi Wuto Kota Yogyakarta dan LKS Amanah di Kabupaten Bantul. Setelah terjun ke lapangan (LKS Amanah), peneliti mengalami kesulitan informan. Wawancara pertama dilakukan kepada ketua LKS, dan wawancara berikutnya kepada pembina serta pengawas; namun keduanya, baik pembina maupun pengawas mengatakan sudah cukup dengan ketua LKS saja sebab datanya sama. Jadi, tidak perlu wawancara dengan yang lain, dan dinamika LKS

Amanah ada pada ketua. Dengan begitu, peneliti merasa ada keraguan data tidak valid sehingga peneliti berkonsultasi kepada promotor dan *co*-promotor, dan disarankan mengganti serta mengurangi jumlah LKS yang pernah diajukan sebelumnya sehingga dari empat LKS tersebut, yang dipilih LKS Hamba. Kendala lain dalam pengambilan data adalah pemeran LKS di LKS Mardi Wuto personalnya super sibuk, untuk kesabaran menunggu antara informan satu dan yang lain memerlukan waktu selama 3 minggu sampai dengan 6 minggu, bahkan lebih; tetapi, masing-masing informan dapat ditemui minimal dua kali wawancara. Wawancara dengan Ketua Yayasan dr. Yap Prawirohusodo (GBPH.H. Prabukusumo, S.Psi.) dilakukan dua kali di kediamannya di kawasan Alun-Alun Selatan. Wawancara dengan Pengawas LKS Mardi Wuto, Dra. IM Sunarsih, Apt., S.U. dilakukan di Kantor Yayasan Kanker di Sendowo, sebab beliau juga sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia serta wawancara kedua dilakukan di Hotel Artotel Jalan Kaliurang; dan wawancara juga dilakukan sebanyak tiga kali dengan Ketua LKS Mardi Wuto (Sri Budiastuti Soenandar, S.H.) di kantor LKS Mardi Wuto.

Wawancara selanjutnya dengan Pembina LKS Mardi Wuto dilakukan oleh dua personal, pertama anggota pembina, dr. Siswanto di RSUP dr. Sardjito (wawancara dengan dr. Siswanto ini atas saran GBPH. H. Prabukusumo, S.Psi.), dan kedua dengan Ketua Pembina LKS Mardi Wuto, KPH.H. Hendrokusumo (wawancara KPH.H. Hendrokusumo untuk kepentingan triangulasi). Karena KPH.H. Hendrokusumo sulit ditemui sehingga kesempatan berwawancara dengan

beliau hanya berlangsung dalam waktu singkat di Kantor Yayasan dr. Yap Prawirohusudo menjelang hari Idul Fitri 1439 H.

Wawancara kepada narasumber pendukung sebagai trianggulasi untuk LKS Mardi Wuto dilakukan dengan kepala tatausaha, Drs. Sri Santoso; dan staf administrasi, Sugeng Mulyono; serta Yustina A.Md. sebagai ketua bidang usaha. Wawancara dengan narasumber pendukung tersebut dilakukan secara nonformal dengan memanfaatkan waktu di setiap ada kesempatan bertemu. Contohnya, wawancara dengan Staf LKS Mardi Wuto dilakukan di BK3S DIY saat diklat TKS, apabila data kurang peneliti diizinkan menelepon atau *whatsapp*. Wawancara kedua dengan Staf LKS Mardi Wuto dilakukan di kantor LKS Mardi Wuto Jl. Cik Ditiro No. 5, Yogyakarta, dan wawancara dengan Yustina A.Md. satu kali di Hotel Ross In saat acara bimbingan teknis LKS diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY.

Di LKS Hamba wawancara dapat dilakukan dengan lancar karena Pengurus atau organyayasan dan pengelola beserta staf setiap hari Rabu ada pertemuan rutin, para-Pengelola LKS Hamba bertempat tinggal dalam satu kompleks dengan LKS, dan Ketua LKS Hamba merangkap jabatan sebagai Ketua Yayasan Hamba sehingga kapan saja peneliti datang ke LKS ini pasti akan berjumpa dengan pengelola dan pengurus. Jika kedatangan peneliti selain di hari Rabu untuk bertemu dengan Pendiri Yayasan dan sekaligus Pembina LKS Hamka (Dra. Lestari Projosuta, M.); Pengawas Yayasan dan LKS Hamka (Gerarda Soepriastoeti Marwanto); dan juga dengan Ketua Pengawas Yayasan Hamka dan LKS Hamka (Nusya Kuswardani, S.H., M.A.) haruslah membuat perjanjian

terlebih dahulu sebab ketiga narasumber tersebut tidak bertempat tinggal di kompleks LKS.

Wawancara dengan Pengawas LKS Hamba dilakukan bersama dua narasumber dengan tujuan triangulasi dan kebetulan ada acara serah terima jabatan atau pergantian pengawas, tetapi di saat wawancara triangulasi hasil penelitian dengan Nusya Kuswardani. S.H., M.A. ini dilakukan di rumah makan Ingkung Grobog di Jalan Timoho, karena kebetulan beliau ada acara di tempat tersebut. Sedangkan wawancara kepada dua narasumber pendukung triangulasi di yayasan dan LKS Hamba dilakukan secara informal, artinya peneliti setiap ada kesempatan bertemu atau via telepon memanfaatkan untuk melengkapi data dan menguatkan kebenaran data.

Selanjutnya, dua kali wawancara dengan pengurus dan pengelola LKS Hamba dilakukan semi FGD, pertama dengan peserta pendiri, pengawas, sekretaris; dan kedua, saat melakukan triangulasi hasil dengan peserta ketua yayasan, sekretaris, dan bendahara.

Setelah data dianalisis dan ternyata ada data yang kurang, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara menyesuaikan dengan momentum, misalnya bertemu dengan Pengelola LKS Mardi Wuto pada acara bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY, dan saat diklat di BK3S DIY atau beberapa data diperoleh melalui alat komunikasi telepon.

2.5.2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Menurut Creswell (2016) observasi yaitu ketika peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan perilaku individu-individu di lokasi penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengamatan dengan merekam atau

mencatat, baik dengan terstruktur maupun semistruktur. Peneliti melakukan beberapa kali observasi di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba selama penelitian berlangsung. Observasi terhadap perilaku pengurus dan perilaku pengelola juga dilakukan di luar kantor LKS, yaitu diobservasi saat rapat di Dinas Sosial DIY, di BK3S DIY, pada saat bimbingan teknis, pada saat presentasi lomba LKS, pada waktu diklat TKS, dan saat pelatihan manajemen LKS maupun tatakelola organisasi sosial. Walaupun peneliti diizinkan oleh pihak LKS untuk pengumpulan data kapan saja dan tidak harus dengan surat, tetapi peneliti tetap beretika untuk mengajukan surat permohonan penelitian.

Fokus observasi dilakukan peneliti berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LKS maupun di luar LKS yang berhubungan dengan *governance* dan diterapkan di LKS. Dalam melakukan observasi, peneliti melihat bagaimana sikap antarorgan, cara pengambilan keputusan, aktivitas pelayanan kepada klien, ketepatan penyampaian laporan, kejujuran mengisi borang lomba LKS, borang akreditasi, borang pendataan LKS, observasi perilaku berkomunikasi antarorgan, perilaku melayani klien, perilaku melayani donatur, komunikasi dengan pemerintah, komunikasi dengan BK3S, dan perilaku menanggapi tekanan pihak eksternal.

2.5.3. Dokumentasi

Dokumen dalam kualitatif dapat berupa dokumen publik maupun pribadi (Creswell, 2016). Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, misalnya profil LKS, akta pendirian yayasan dan LKS,

dokumen donatur, dokumen *case conference*, dokumen penggunaan keuangan, dokumen SOP penerimaan bantuan, SOP pertanggungjawaban, SOP lain yang semuanya bagian dari data, dan data tersebut berhubungan dengan judul penelitian. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto narasumber serta narasumber pendukung, dan kebetulan semua narasumber bersedia didokumentasikan.

2.6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah organyayasan yang terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus, serta dari eksekutif (pengelola), yaitu ketua LKS dan jajarannya. 2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (lihat Tabel 2.1.). Data ini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di LKS ataupun di luar LKS, tetapi ada kaitannya dengan LKS dan sesuai dengan judul penelitian.

2.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Berhubungan dengan hal ini, Creswell (2016)

telah menjelaskan bahwa peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Dengan begitu, peneliti lah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Adapun masalah yang akan diteliti di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba:

1. Proses tatakelola yang dijalankan di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba dalam menjalankan roda organisasi, dan mengapa serta bagaimana cara proses itu harus dijalankan. Setiap LKS berbeda-beda dalam menjalankan roda organisasi karena disesuaikan dengan sejarah kelahiran LKS, nilai filosofi, kebutuhan, dan situasi pendukung lainnya. Beberapa yang akan diteliti terkait proses tatakelola di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba adalah:

- a. Profil dan sejarah LKS
- b. Struktur organisasi LKS
- c. Unsur atau organtatakelola (*governance*)
- d. Proses pembentukan organ-*governance*.
- e. Persepsi dan identifikasi pelaku
- f. *Basic* filosofi dan ideologi *governance*

2. Rantai nilai dan perkembangan LKS Praktik menerapkan aturan negara dalam operasionalisasi LKS sebagai organisasi nirlaba.

- a. Aturan negara yang ditaati oleh LKS dan aturan yang diabaikan atau dilanggar oleh LKS.
- b. Alasan mentaati aturan negara dan keuntungan yang diperoleh LKS.
- c. Alasan melanggar atau mengabaikan aturan negara dan risiko yang dihadapi.

Keterkaitan tipologi *governance* yang dipilih atau diterapkan di LKS, akan berpengaruh terhadap proses mekanisme dan berdampak pada ketaatan peraturan atau tidak taat terhadap aturan negara. Dari fokus pertanyaan di atas, akan diperoleh sejumlah data yang dapat digunakan untuk memformulasikan keunikan masing-masing LKS, dan keunikan inilah yang disebut dengan *best practice*.

2.8. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan (*purposive sampling*), yaitu peneliti sengaja memilih informan dengan memperhatikan kriteria-kriteria *sampling* (informan) yang dipilih dapat memasok informasi kepada peneliti selengkap mungkin sehingga sampel penelitian kualitatif cukup kecil tidak perlu mewakili populasi dan dipilih atau ditentukan menurut tujuan (Creswell, 2016).

Karena penelitian ini studi kasus, peneliti lebih memperhatikan situasi sosial yang terdiri dari: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*); seperti pendapat Creswell (2016), bahwa gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan parapartispipan dan lokasi penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti. Gary (1993) dan Williamson, et.all (1992) menyatakan memilih orang-orang terbaik yang dapat memberikan informasi akurat dengan sebutan “*the typical and the best people*” sehingga informan akan banyak memberikan pengalaman unik dan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan peneliti.

Hamid (2010) mengutip pendapat Lincon dan Guba (1985) serta Glasser dan Strauss (1967), bahwa hanya dapat digunakan ketika peneliti telah melakukan

studi penjajakan secara baik dan lama. Dalam hal ini, peneliti terlibat dalam dinamika LKS kasus sejak 2003 peneliti sebagai pengurus di BK3S DIY sampai sekarang, pada 2011 peneliti sebagai tim monitoring program sosialisasi SNPA, peneliti sebagai narasumber Dinas Sosial DIY dalam kegiatan bimbingan teknis LKS, juri lomba LKS, peneliti sebagai asesor akreditasi LKS, peneliti anggota tim verifikasi LKS DIY, peneliti sebagai penyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang LKS; dengan demikian, peneliti telah mengetahui *the typical and the best people* di kedua LKS. Dari *purposive* peneliti lanjutkan wawancara mendalam ke *snow ball sampling* atas petunjuk *purposive* sampai pada titik jenuh (*snow ball sampling*), artinya data dianggap cukup oleh peneliti.

Atas dasar itu, peneliti menetapkan *purposive sampling* LKS Mardi Wuto ialah GBPH. H. Prabukusmo. S.Psi. sebagai Ketua Yayasan dr. Yap Prawirohusodo sejak 2000 yang sebelumnya menjadi relawan di LKS Mardi Wuto. *Purposive sampling* LKS Hamba ditetapkan peneliti Dra. Lestari Projosuta, M.A. sebagai pendiri LKS Hamba yang terlibat langsung sejak 1976 ketika merintis di Jakarta sampai hijrah ke Yogyakarta. Dari *purposive sampling* pertama dilanjutkan ke *sampling* dua dan seterusnya sesuai kebutuhan. Dalam menentukan narasumber penelitian ini, peneliti memiliki kriteria yang dijadikan sebagai narasumber, yaitu:

LKS Mardi Wuto

1. GBPH. H. Prabukusumo, S. Psi.

Beralamat di Kraton Yogyakarta, RT032/RW009, Kelurahan Panembahan,

Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. GBPH. H. Prabukusumo aktif di LKS Mardi Wuto sejak 2003-2018 dengan jabatan sebagai Ketua Yayasan dr, Yap Prawirohusodo.

2. dr. Siswanto Santrowiyoto, Sp. THT (K), M.H.

Mulai aktif di Yayasan dr. Yap Prawirohusodo pada 2013, beliau dipilih dalam rapat pleno tahunan sebagai anggota pembina. Saat ini masih aktif sebagai dokter di RSUP dr. Sardjito.

3. Dra. IM Sunarsih, Apt., S.U.

Mulai 2001 aktif sebagai relawan di LKS Mardi Wuto, pada 2004-2008 dipilih sebagai anggota bidang keuangan, dan mulai 2013 diangkat menjadi Ketua Pengawas Yayasan dr. Yap Prawirohusodo. Pensiunan Apoteker Dinas Kesehatan Daerah DIY.

4. Sri Budiastoeti Soenandar, S.H.

Mulai bergabung di LKS Mardi Wuto 2007 dan 2008 berdasarkan rapat yayasan mendapat amanah sebagai ketua LKS, dan akan berakhir bulan Juni 2018. Pendidikan terakhir Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada, Pensiunan Hakim Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Yustina Satiti Sumadi, A.Md.

Mengabdikan diri di LKS Mardi Wuto mulai 2005 sebagai relawan, pada 2008-2013 sebagai sekretaris dua, mulai 2013-2018 sebagai ketua bidang usaha. Pendidikan terakhir Akademi Kebidanan, dan beliau pensiunan Bidan di RSUP dr. Sardjito.

6. Drs. Sri Santoso

Mulai masuk sebagai karyawan LKS Mardi Wuto September 1991. Awalnya sebagai staf dan sejak 2007 sebagai kepala tatusaha. Pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan Luar Sekolah IKIP Karangmalang Yogyakarta.

7. Sugeng Mulyono

Staf administrasi mulai masuk sebagai karyawan LKS Mardi Wuto Desember 1992 sampai dengan sekarang. Pendidikan terakhir tamat SMA 1991.

LKS Hamba

1. Dra. Lestari Projosuta, M.A.

Pendiri Yayasan Hamba. Narasumber ini merupakan Pendiri Yayasan Aulia dan LKS Aulia pada 1995-2015, kemudian berubah nama menjadi Yayasan Hamba dan LKS Hamba sampai saat penelitian ini berlangsung. Kedudukan dalam struktur pengurus saat sekarang sebagai pendiri sekaligus Pembina Yayasan Hamba dan LKS Hamba.

2. Konaah Sri Melani

Ketua Yayasan Hamba sekaligus ketua LKS Hamba. Telah bergabung dengan Yayasan dan LKS Aulia sejak masih berada di Jakarta 1995, pendiri cabang di Yogyakarta dan sampai saat ini beliau mempunyai perhatian besar kepada yayasan, LKS dan anak-anak (klien). Pada saat berdiri sampai 2015 beliau adalah pengasuh, dan mulai 2015 berdasarkan rapat yayasan diangkat menjadi Ketua Yayasan Hamba sekaligus Ketua LKS Hamba. Pendidikan terakhir SMA.

3. Gerarda Soepriastoeti Marwanto

Ketua Pengawas Yayasan Hamba dan Pengawas LKS Hamba. Panggilan akrab Gerarda Soepriastoeti Marwanto adalah Ibu Nunuk. Beliau bergabung dengan Yayasan Hamba sejak 2013. Dalam rapat yayasan sejak masuk sampai penelitian ini berlangsung dipercaya sebagai pengawas. Pendidikan terakhir SMA, dan mulai Maret 2018 dipercaya sebagai pembina.

4. Dwi Mariyati

Dwi Maryati adalah bendahara, awalnya sebagai relawan dan mulai bergabung 2001. Pada 2012 diangkat menjadi sekretaris yayasan sekaligus Sekretaris LKS Hamba. Pada 2018 kedudukan bergeser menjadi bendahara. Pendidikan terakhir SMA.

5. Theresia Sri Sugiyanti

Theresia Sri Sugiyanti bergabung sejak yayasan dan LKS dirintis di Jakarta bersama Konaah Sri Melani. Dari awal sampai 2015 sebagai pengasuh, dan mulai Maret 2018 berdasarkan atas rapat yayasan, Theresia Sri Sugiyanti diangkat sebagai wakil ketua.

6. Nusya Kuswardani, S.H., M.A.

Mulai bergabung di Yayasan Hamba sejak 2015 sebagai relawan, menurut informasi dari Dra. Lestari Projosuta, M. A. dan Gerarda Soepriastoeti Marwanto (Ibu Nunuk), bahwa Nusya Kuswardani, S.H., M.A. sejak bergabung dimagangkan atau dicalonkan sebagai ketua pengawas, oleh karena itu sejak Maret 2018 beliau disahkan sebagai ketua pengawas. Pendidikan terakhir S2 Antropologi dan saat ini sedang menempuh S3 antropologi di UGM, dan secara kebetulan beliau saat ini sedang menulis buku bibliografi

Dra. Lestari Projosuta, M.A. dengan fokus pada teknik menanamkan nilai kepada seluruh organ dan klien LKS Hamba yang disebutnya *golden role*. Atas atas dasar ini, secara tidak langsung beliau juga sedang melakukan penelitian di LKS Hamba seperti peneliti sehingga beliau dapat dijadikan sebagai triangulasi peneliti.

2.9. Teknik Analisis Data

Penelitian pada kualitatif secara umum analisis data dilakukan menjadi dua bagian. Bagian pertama analisis data sebelum terjun lapangan dan bagian kedua analisis data pascaterjun lapangan. Dengan catatan pada saat analisis pascaterjun lapangan apabila diketahui datanya kurang, peneliti akan ke lapangan kembali untuk melengkapi data, dengan maksud agar data yang dianalisis benar-benar lengkap dan valid.

Teknik analisis data studi kasus bersifat spesifikasi sebab kasus dalam suatu kejadian yang harus tampak potret kehidupan LKS sehingga pada akhirnya kasus dapat menjadi sebuah objek studi atau kasus dapat menjadi metodologi, karena kasus berada dalam sistem yang terikat oleh waktu dan tempat (Merriam, 1998; Stake, 2005).

Struktur studi kasus kolektif menurut Lincoln dan Guba (2000) terdiri dari masalah, konteks, isu, dan pelajaran yang dipelajari. Karena studi kasus kolektif, kasusnya cenderung luar biasa, ada batasan waktu, peristiwa dan proses maka dalam studi kasus teori setelah proses berakhir baru dicarikan yang sesuai atau cocok dengan kasus tersebut (Cormick, 1994; Creswell, 2016).

Cormick (1994) merumuskan pertanyaan prosedural pada studi kasus kolektif harus mengalami apa yang terjadi, siapa yang terlibat, tema respon, konstruksi teori yang dapat membantu memahami respons, dan konstruksi yang unik dalam kasus tersebut. Dengan demikian, peneliti di bagian akhir akan dapat mendeskripsikan bagaimana suatu kasus dan peristiwa digambarkan, merumuskan tema yang muncul dari informasi (analisis materi), dan bagaimana peneliti menginterpretasikan tema berdasarkan atas literatur.

2.9.1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dalam kaitan ini, Sekaran dan Bougie (2017) mengatakan bahwa setelah mengumpulkan data dari informasi awal atau data sekunder, peneliti berada pada tahap mempersempit masalah dari dasar awal yang luas dan menentukan fokus masalah dengan lebih jelas. Awalnya tema penelitian ini adalah “tipologi *governance* LKS berprestasi di Daerah DIY”.

Berdasarkan atas data sekunder yang ditemukan, penelitian ini dipersempit menjadi “tipologi *governance* LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba” di Daerah DIY. Tipologi *governance* LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba diperdalam dengan tiga isu besar, yaitu: 1. Tipologi *governance* yang diterapkan LKS, 2. Proses mekanisme *governance*, dan 3. Kepatuhan LKS terhadap peraturan internal (AD-ART) dan peraturan eksternal (negara).

2.9.2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data pada kualitatif bukanlah proses linier, langkah demi langkah. Pengkodean data dapat membantu secara bersamaan membangun ide bagaimana data disajikan, seperti halnya menarik beberapa kesimpulan awal, dan akhirnya dapat membantu bagaimana data mentah dikodekan, dikategorikan, dan disajikan (Sekaran dan Bougie, 2017). Berikut ini tahapan analisis data lapangan.

a) Reduksi data

Dalam penelitian kualitatif tentunya data yang diperoleh tidaklah sedikit sehingga langkah pertama yang harus dilakukan dalam analisis data ialah reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Pengkodean merupakan proses analisis data yang telah dikumpulkan direduksi, disusun kembali, dan diintegrasikan untuk membuat teori. Tujuannya ialah membantu menarik kesimpulan tentang data dari wawancara yang dilakukan dengan tujuh narasumber di LKS Mardi Wuto dan enam narasumber untuk LKS Hamba. Kemudian dari transkrip tersebut dipilih dan dirangkum data yang paling sesuai dengan topik penelitian sehingga mudah untuk melihat persamaan maupun perbedaan dari setiap narasumber.

b) Display Data

Setelah data direduksi selanjutnya mendisplaykan data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sekaran dan Bougie, 2017) penyajian data merupakan kegiatan kedua yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif. Penyajian data termasuk menggunakan data yang sudah direduksi dan menyajikannya dengan cara terorganisasi dan singkat.

Penulis menyajikan uraian singkat berupa tabel dan bagan dari keseluruhan data yang diperoleh penelitian. Uraian tersebut menggambarkan secara singkat mengenai alur penelitian yang dilakukan. Pengambilan data yang berulang dan memerlukan waktu yang lama membuat data juga semakin berkembang sehingga peneliti harus selalu menguji data yang ditemukan di lapangan dengan data yang *didisplay* apakah sesuai dan dapat mudah dipahami.

c) Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis akhir dari analisis kualitatif. Hal ini paling penting dalam menganalisis data karena merupakan tahap penulis menjawab pertanyaan penelitian untuk menentukan apa yang diwakili oleh tema yang diidentifikasi, dengan mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti atau dengan membuat kontras dan perbandingan (Sekaran dan Bougie, 2017).

Pada awal melakukan penelitian peneliti berasumsi bahwa:

LKS Mardi Wuto

Model *governance* yang dipilih atau diterapkan adalah demokrasi, dengan asumsi melihat sikap dan perilaku Pengurus dan Pengelola yang sangat terbuka dan cair. Ternyata asumsi ini salah, sebab praktik *governance* di LKS Mardi Wuto ternyata sangat birokratis.

Semakin dalamnya pengambilan data dilakukan melalui wawancara, peneliti memperoleh fakta bahwa penerapan *governance* di LKS Mardi Wuto ditemukan data yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan peneliti, yaitu: LKS Mardi Wuto tidak memiliki SDM pekerja sosial profesional dan tenaga

kesejahteraan sosial (TKS) sehingga pelayanan yang dilakukan kepada klien cenderung berdasarkan atas keinginan pengelola tanpa menghiraukan standar operasional LKS yang diatur oleh Kementerian Sosial RI. Padahal, standar SOP yang ada dijalankan LKS Mardi Wuto berupa SOP yang bersifat *general*, bukan SOP yang khusus untuk pemenuhan kebutuhan PMKS.

Berdasarkan atas data tersebut, LKS Mardi Wuto tidak taat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

LKS Hamba

Model *governance* yang diterapkan atau dipilih di LKS Hamba ialah birokrasi, dengan asumsi melihat sikap dan perilaku pendiri yang keras dan sangat tertib serta parapengelola sangat hormat kepada Pengurus, terutama kepada pendiri. Ternyata asumsi ini salah, sebab dalam pengambilan keputusan apapun, baik pendiri maupun Pengurus selalu melibatkan pihak Pengelola dan menghargai ide-ide dari unsur Pengurus dan unsur pengelola.

Dengan semakin mendalamnya pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara, peneliti mendapatkan fakta bahwa penerapan *governance* di LKS Hamba ditemukan sesuatu yang unik, yaitu pelanggaran peraturan negara, khususnya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dalam undang-undang ini diatur secara tegas bahwa pengurus yayasan tidak boleh

merangkap jabatan pada unit kegiatan yayasan. Akan tetapi, pada kenyataannya di LKS Hamba sejak awal berdiri sampai dengan penelitian berlangsung ketua yayasan merangkap jabatan sebagai ketua LKS. Dalam hubungan ini, dugaan pihak yang belum pernah meneliti pastilah terjadi penyimpangan kewenangan, penggunaan hak yang berlebihan, dan lain-lainnya. Fakta yang terjadi sejak berdiri sampai dengan penelitian berlangsung tidak pernah ada penyimpangan kewenangan dan penggunaan hak yang berlebihan, dengan catatan jika ketua yayasan yang dipilih adalah orang dalam. Arti orang dalam adalah subjek atau orang yang sudah mengabdikan dirinya di yayasan atau di LKS cukup waktu, karena nilai filosofi yang ditanamkan pendiri sudah masuk dalam jiwa sanubari orang tersebut. Akan tetapi, jika subjek atau orang dipilih dalam rapat yayasan adalah orang baru (belum pernah) menjadi relawan di yayasan atau di LKS Hamba maka akan terjadi penyimpangan kewenangan dan hak-hak lainnya.

2.10. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data peneliti akan melakukan keabsahan data, agar penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar. Kebenaran data dan kesimpulan yang benar menurut Awaliyah (2010) mampu mewujudkan produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar, dan beretika.

Dalam upaya menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data serta pelaksanaan teknik pemeriksaan, menurut Bachri (2010) dan Awaliyah (2010) ada empat, yaitu:

1. Uji derajat kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Positifnya peneliti tidak dianggap sebagai orang yang mengganggu karena sudah terbentuk rapor “*mutual trust*” sehingga kehadiran peneliti dibutuhkan (Steinbeck, 1969). Secara kebetulan peneliti sebagai pengurus BK3S DIY dan narasumber di Dinas Sosial DIY serta asesor akreditasi LKS sehingga kehadiran peneliti diterima dengan baik dan sudah terbangun hubungan *mutual trust*.

Credibility dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya: a) perpanjangan pengamatan, dilakukan ketika data kurang lengkap maka peneliti datang kembali ke LKS berulang-ulang sampai data penelitian diyakini sudah kredibel. b) meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pada tahap ini peneliti membaca ulang dan mengecek ulang urutan peristiwa agar kesinambungan dalam menyusun deskripsi data akan lebih akurat. c) diskusi dengan teman sejawat, pada bagian ini peneliti berdiskusi untuk meminta masukan kepada sesama mahasiswa S3 di kampus UII: Ibu Mayang, Samsul, dan pengawas di LKS Hamba yang kebetulan juga sedang membuat penelitian disertasi tentang bibliografi Pendiri LKS Hamba. d) analisis kasus negatif, peneliti berdiskusi dengan pengurus forum LKS dan pengurus LKKS Kabupaten Sleman, khususnya membahas tentang informasi negatif “kristenisasi”, dan e) triangulasi, untuk triangulasi peneliti telah melakukan beberapa jenis, seperti berikut.

Trianggulasi merupakan bagian dari uji kredibilitas, dalam pengujian kredibilitas ini dijadikan alat sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Uji kredibilitas data merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang, peneliti partisipan, atau pembaca (Creswell dan Miller dalam Creswell, 2016). Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan trianggulasi sebagai uji kredibilitas. Berhubungan dengan hal tersebut, trianggulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Trianggulasi ini terbagi menjadi empat, yaitu sumber, teknik, waktu, hasil, dan peneliti.

Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiono, 2013). Trianggulasi sumber pada penelitian yang dilakukan di LKS Mardi Wuto dilakukan kepada tujuh orang yang berasal dari tiga unsur, yaitu pengurus, pengelola, dan staf; di LKS Hamba dilakukan kepada enam orang dari empat unsur, yaitu pendiri, pengurus, pengelola, dan staf.

Tabel 2.2. Data Trianggulasi Sumber

No.	Unsur	LKS	
		Mardi Wuto	Hamba
1	Pendiri	-	Lestari Projosuto
2	Pembina	dr. Siswanto Santrowiyoto, Sp. THT (K), M.H. KPH. H. Hendokusumo	Lestari Projosuto
3	Pengawas	Dra. IM. Sunarsih. Apt., S.U.	Gerarda Soepriastoeti Marwanto Nusya Kuswantin, S.H., M.A.
4	Pengurus	GBPH. H. Prabukusumo, S.Psi.	Konaah Sri Melani
5	Pengelola	Sri Budiastoeti Sunandar, S.H.	Konaah Sri Melani
6	Staf	Drs. Sri Santoso (kepala TU)	Dwi Mariyati (Bendahara-sekretaris LKS)
7		Sugeng Mulyono	Theresia Sri Sugiyanti (wakil ketua-sekretaris pengasuh)
8		Yustina Satiti Sumadi. A.Md. (bidang usaha)	

Sumber: Data primer 2017.

Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Trianggulasi teknik ini menggunakan wawancara, observasi secara terus-menerus, dan dokumentasi penelitian agar data yang diperoleh semakin valid (Sugiyono, 2013). Dalam melakukan wawancara di dalam penelitian ini peneliti terkadang masih belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga di akhir wawancara peneliti akan menanyakan lagi pertanyaan yang belum terjawab dengan lebih mengerucutkan ke pokok permasalahan.

Trianggulasi waktu

Tujuan trianggulasi waktu untuk memperoleh data yang lebih valid dan stabil atau *ajeg* (konstan) atas jawaban narasumber. Trianggulasi waktu dapat dilakukan pada situasi di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Pada penelitian ini trianggulasi waktu dilakukan menggunakan jarak waktu yang berbeda. Artinya, pertanyaan kembali diulang dengan jarak bulan. Sebab, penelitian yang dilakukan tidaklah sekadar mendapatkan data kemudian dianalisis, tetapi peneliti mencoba membuat solusi.

Trianggulasi Solusi

Peneliti tidak sekadar mencari data kemudian menemukan masalah dan dianalisis, kemudian hasil analisis ditulis dalam laporan penelitian. Akan tetapi, masalah yang ditemukan ditindaklanjuti dengan memberikan alternatif solusi.

Solusi yang sudah dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pelatihan tatakelola dan manajemen rumah tangga LKS, untuk pelatihan ini peneliti bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah DIY sebagai penanggung jawab, BK3S DIY sebagai penyelenggara dan CSR & SME Patnersip Program JBT PT Pertamina Persero, serta Founder dan Owner Dowa. Dua perusahaan tersebut sebagai sponsor tunggal. Dalam penelitian ini, semua kurikulum dan narasumber ditentukan peneliti berdasarkan atas hasil temuan di kedua LKS, namun demikian peserta pelatihan tidak hanya dari kedua LKS, sebab peneliti juga mengundang LKS lain sebanyak 30 LKS. Salah satu narasumber pelatihan adalah promotor dalam penelitian ini.

Pelatihan pertama dilakukan diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), diklat TKS dilaksanakan dua kali. Diklat angkatan pertama dilaksanakan 11 April sampai dengan 2 Agustus 2017. Diklat TKS angkatan pertama disponsori oleh CSR & SME Patnersip Program JBT PT Pertamina Persero. Diklat TKS angkatan pertama LKS Hamba mengirimkan satu peserta sesuai dengan jatah yang diatur BK3S, tetapi LKS Mardi Wuto belum mendapatkan jatah karena kuota terbatas.

Materi diklat terdiri dari: pengantar ilmu kesejahteraan sosial, etika pekerja sosial, sistem usaha kesejahteraan sosial, administrasi kesejahteraan sosial, manajemen kasus, model-model intervensi, metode pekerjaan sosial, teknik *assesment*, psikologi untuk pekerja sosial, perundang-undangan sosial, praktikum pekerjaan sosial, komunikasi untuk pekerja sosial, kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di DIY, dan praktikum. Jumlah jam pelajaran 222 JPL @ 50 menit.

Pascadiklat angkat pertama ada 8 orang peserta yang dapat mengikuti sertifikasi TKS. Penyelenggaraan diklat mendapat saran dari asesor dan ikatan pekerja sosial profesional Indonesia (IPSPI) serta asosiasi pendidikan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial Indonesia (ASPEKSI), agar judul materi diklat pengantar ilmu kesejahteraan sosial diganti dengan dasar-dasar pekerjaan sosial.

Diklat TKS angkatan kedua disebut sebagai Diklat TKS Mandiri, disebut mandiri karena pelatihan ini peserta membayar @ Rp 3.500.000,00; sebab pada pelatihan pertama peserta gratis biaya ditanggung oleh CSR & SME Patnersip Program JBT PT Pertamina Persero. Pada Pelatihan TKS Mandiri LKS Mardi

Wuto mengirim dua peserta. LKS Hamba tidak mengirim karena sudah memiliki SDM Pekerja Sosial Profesional dan TKS, serta sudah mengikuti diklat angkatan pertama.

Diklat TKS Mandiri dilaksanakan mulai 30 April 2018 sampai dengan 27 Juni 2018. Tujuan Diklat TKS ini antara lain: a. memenuhi standarisasi minimal Tenaga Kesejahteraan Sosial bagi Orsos/LKS, b. tersedianya tenaga kesejahteraan sosial di LKS-Orsos DIY, khususnya LKS yang akan mengikuti akreditasi LKS.

Pelatihan ketiga bagian *treatment* LKS Hamba tatakelola LKS dilaksanakan pada 4-9 September 2017 dengan jumlah jam pelajaran 38 JPL @ 50 menit. Pelatihan bertujuan: a. memperkuat kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggara usaha kesejahteraan sosial di DIY bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, b. memperkuat SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai kunci penggerak tercapainya pembangunan kesejahteraan sosial di DIY, c. peserta memperoleh pencerahan tatakelola LKS yang sehat sehingga mampu *me-review* Visi, Misi, AD-ART, dan program kerja masing-masing LKS.

Materi pelatihan meliputi: dinamika kelompok, *assesment* fundamental LKS, asas-asas manajemen, standar operasional manajemen, standar operasional pelayanan LKS, AD-ART LKS, praktik penyusunan AD-ART LKS, visi-misi LKS dan praktik penyusunan visi misi LKS, *stakeholder* dan *shareholder* LKS dan teknik mengelola *stakeholder* dan *shareholder* LKS, struktur organisasi LKS.

Pelatihan keempat adalah manajemen rumah tangga lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga diselenggarakan 2-6 Oktober 2017, dengan jumlah jam

pelajaran 26JPL @ 50 menit. Materi diklat terdiri dari: *asesment* fundamental LK3, asas-asas manajemen, standar operasional manajemen dan standar operasional pelayanan LK3, komunikasi keluarga, manajemen arsip keluarga, pengetahuan keluarga luas, perencanaan keluarga, ketahanan keluarga, dan hipnoterapi dalam konseling keluarga.

Trianggulasi hasil

Trianggulasi hasil atau temuan merupakan proses konfirmabilitas, dimaksudkan agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan trianggulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Trianggulasi temuan disampaikan dan didiskusikan kepada pengawas dengan alasan pengawas memiliki kewenangan dalam organorganisasi untuk meluruskan, mengevaluasi, dan memberikan masukan. Di LKS Hamba trianggulasi peneliti disampaikan kepada pengawas, Nusya Kuswatin, S.H., M.A. dan kepada pengelola LKS. Di LKS Mardi Wuto trianggulasi disampaikan kepada pengawas, Dra. IM Sunarsih, Apt., S.U. dan hasilnya dapat menerima dan memahami kelemahan masing-masing LKS serta akan dibawa dalam rapat pengurus. Di samping itu, peneliti memberikan masukan:

LKS Mardi Wuto: pengelola dan pengawas terus mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Menteri Sosial RI, dan menempatkan karyawan yang telah di diklat TKS untuk diposisikan sebagai TKS, bukan sebagai administrasi umum.

LKS Hamba: pertimbangkan kembali status rangkap jabatan, mulai kaderisasi dari relawan dan menempatkan pengelola sesuai dengan pendidikan formal dan nonformal yang telah diikuti.

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan merupakan validitas eksternal, artinya hasil penelitian dibaca pihak eksternal bukan peneliti, apakah pihak eksternal mudah memahami dan menyakini kebenarannya, jika pihak eksternal mudah memahami dan menyakini kebenaran proses dan hasil penelitian maka akan diambil sebagai acuan atau referensi untuk diaplikasikan di tempat lain sehingga terjadi “nilai transfer”, karena peneliti tidak menjamin validitas eksternal (Sanafiah, 2007).

Pendapat Marrow (2005) senada dengan pendapat Sanafiah (2007), bahwa bagaimana peneliti sebagai instrumen penelitian mampu memberikan cukup informasi mengenai konteks penelitian dan proses, supaya memungkinkan pembaca memutuskan bagaimana temuan dapat ditransfer sehingga dalam pembuatan laporan penelitian mampu diterima oleh pembaca karena peneliti telah melalui beberapa proses. Proses paling awal ialah saat pengambilan data, peneliti melakukan pengambilan secara berulang atau terus-menerus hingga data tersebut mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

Kemudian peneliti mereduksi data kasar/mentah tersebut sehingga mudah menarik kesimpulan. Setelah melakukan reduksi data peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan dan tabel agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam proses penyajian data atau *display* data, hasil yang diperoleh mengalami perkembangan sehingga peneliti harus kembali melakukan pengambilan data agar informasi yang

dibutuhkan dapat terpenuhi. Dari analisis data yang telah dilakukan, peneliti akan mudah mendeskripsikan laporan hasil penelitian yang dilakukan sehingga dapat diterima oleh pembaca. Apabila semua yang dilakukan peneliti sesuai dengan fakta maka realibilitas peneliti satu dengan peneliti yang berbeda akan menghasilkan produk yang sama, karena kasusnya sama dan waktu serta sistemnya juga sama.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan proses antisipasi bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sehingga dimungkin terjadi kelelahan atau kejenuhan, oleh karena itu perlu dilakukan pengulangan dengan harapan mendapatkan data yang benar-benar sama sehingga data terpenuhi kriteria validitasnya. Sebab, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara fakta yang terjadi di lapangan dan data yang dilaporkan peneliti. Dalam studi kualitatif studi kasus data tidak dapat digeneralisasikan karena tingkat keunikan kasusnya berbeda. Akan tetapi, orang lain dapat mereplikasikan atau mengulang proses dan caranya dengan mengaudit semua proses penelitian yang pernah dilakukan.

4. Uji Kepastian (*conformability*)

Conformability yaitu objektivitas bahwa hasil penelitian disepakati untuk diterima, hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji objektivitas kriteria kepastian atau objektivitas berpusat pada data, bukan pada orang atau banyaknya orang. Menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian telah terpenuhi standar *conformability*-nya (Creswell, 2016). Proses penulisan disertasi ini telah melalui beberapa kali revisi sesuai dengan hasil konsultasi dengan

pembimbing, serta seminar proposal dari penguji dan pembimbing. Ujian proposal pertama pada Juni 2014, karena promotor sakit pada 2017 diulang kembali ujian proposal dengan promotor dan pengunji yang berbeda, tetapi *co-promotor* tetap. Mei 2019 ujian seminar hasilnya ada perbaikan kembali, baik dari penguji maupun pembimbing, dan perbaikan yang paling memakan waktu agak lama adalah mengubah tata tulis disertasi atas kesepakatan tim penguji. Revisi yang diperlukan telah dibuat dan telah dilengkapi sesuai dengan catatan pembimbing dan penguji dalam rangka penyempurnaan penelitian disertasi ini.

Hasil prapenelitian dan penelitian ini telah dipresentasikan dalam: 1) seminar nasional pada Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial IX 2017 diselenggarakan DNIKS bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI. 2) konferensi internasional pada *International conference on social work in health and mental health*, Faculty of Social and political Sciences University of Muhamadiyah Jakarta 2019, dengan judul *Responsibility Principles in Good Corporate Governance Framework of Social Welfare Institution in special region of Yogyakarta*. 3) *Paper* internasional yang terindeks scopus Q4 dengan judul *Phenomenological Study on the Governance of "Social Welfare Institutions" in Special Region of Yogyakarta. The 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid Spain*. 4) *Paper* internasional dengan judul *Comparative Governance of Non-Profit Organization: case study of ONL Mardi Wuto and Hamba in Yogyakarta. International Journal Economic, Business and Entrepreneurship*, Vol. 1, No. 2, FEB, UNILA. 5) *Paper* berjudul *Responsibility Principles in Good Corporate Governance Framework of Social Welfare Institution in special region of Yogyakarta*, yang dipresentasikan pada konferensi internasional di *Faculty of*

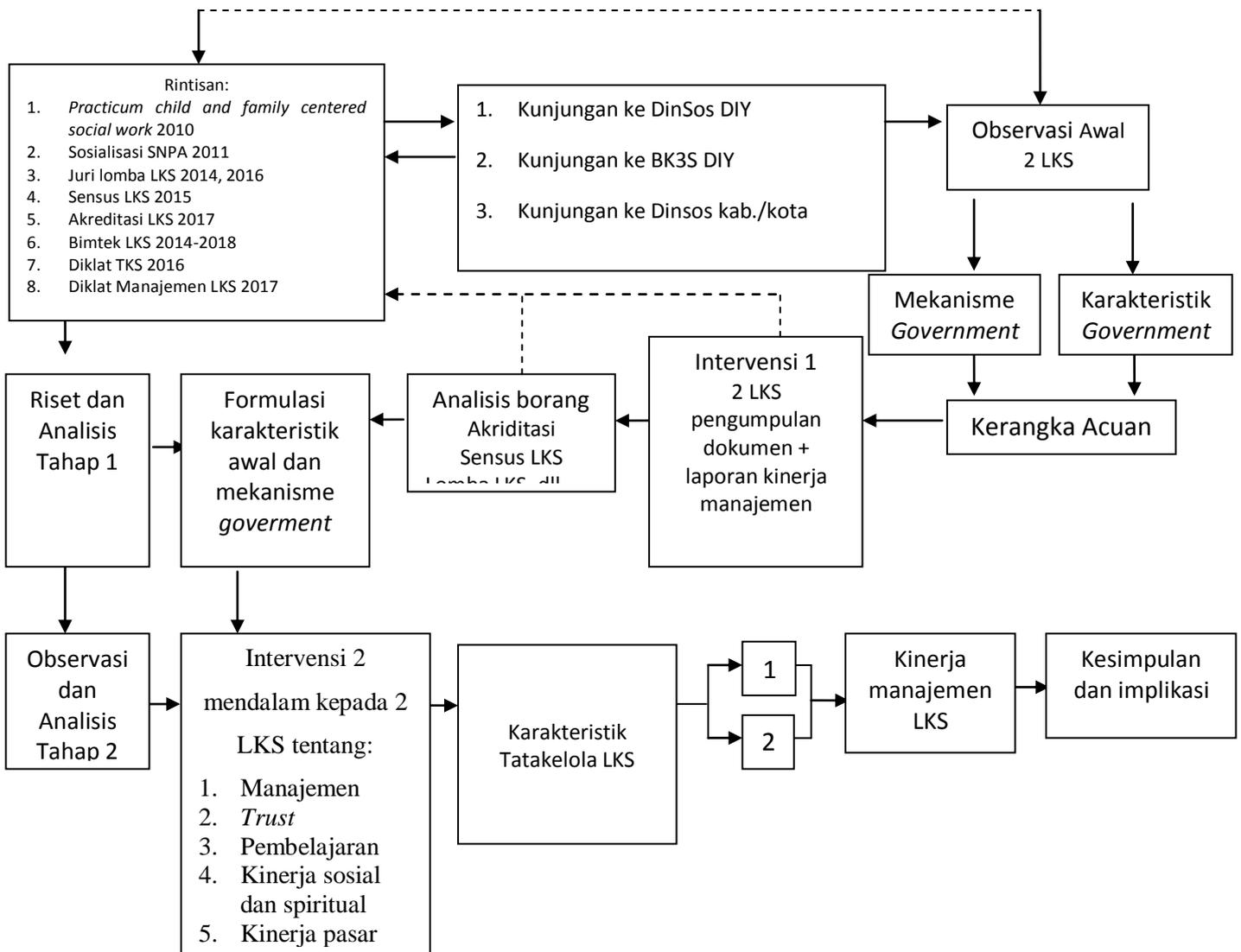
Social and political Sciences University of Muhamadiyah Jakarta 2019, diterbitkan oleh international journal of Economic, Business, and Entrepreneurship (IJEBE) Vol. 2, number 1 (2019). Paper tersebut juga ditawarkan oleh Lap Lambert Academic Publishing Founded in Germany in 2002 untuk diterbitkan.

Menjadi bahan kajian dalam Diklat Tatakelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan BK3S DIY bekerja sama dengan DOWA Foundation dan Dinas Sosial DIY 2018. Menjadi materi bimbingan teknis LKS Dinas sosial DIY 2018-2019. Menjadi materi rapat kerja komisi karya Suster Sang Timur Indonesia 2019. Hasil penelitian ini telah diterima BK3S DIY dan Dinsos DIY sebagai materi Diklat LKS, hasil [enelitian ini telah diterima ikatan pekerja social professional, khususnya tentang tatakelola LKS (semua data terlampir).

2.11. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir merupakan peta ringkas sebagai gambaran proses penelitian yang dapat dipelajari secara mudah, baik oleh peneliti maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Berdasarkan atas hal itu, penting bagi peneliti menggambarkan kerangka berpikir penelitian ini, seperti disajikan pada bagan 3.1. berikut.

Bagan 2.1. Alur pikir penelitian



Sumber: Data primer 2018.